



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 23 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya pengadaan alat-alat kesehatan dan peralatan medis, perawatannya, pertanggungjawabannya dan biaya operasional;
- b. Serta diharapkan dapat merupakan menjadi sumber PAD dan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian perlu dilaksanakan penyesuaian sebagian tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu dilakukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembara Negara Nomor 4111);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 1

- (1) Beberapa ketentuan pada lampiran II Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dirubah antara lain tarif pelayanan pada:
 - a. Angka III tentang Instalasi Kamar jenazah point III Ambulance dan Mobil Mayat;
 - b. Angka V tentang Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - c. Angka IX tentang UPF Penyakit THT;
 - d. Angka XVI tentang Instalasi Patologi Anatomi;
 - e. Angka XIX tentang SMF Penyakit Anak
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 15 MEI 2008

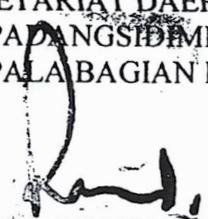
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 23

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024

LAMPIRAN I PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIMPUNAN

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 MEI 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. LABORATORIUM

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH
1	HDL	22.230,-	11.115,-	33.345,-	28.899,-	14.450,-	43.393,-	31.899,-	17.450,-	49.349,-	37.899,-	23.450,-	61.349,-
2	LDL	22.230,-	11.115,-	33.345,-	28.899,-	14.450,-	43.393,-	31.899,-	17.450,-	49.349,-	37.899,-	23.450,-	61.349,-
3	ASTO	22.848,-	11.424,-	34.273,-	27.418,-	13.709,-	41.127,-	30.418,-	16.709,-	44.127,-	36.418,-	22.709,-	50.127,-
4	RH FAKTOR	22.848,-	11.424,-	34.273,-	27.418,-	13.709,-	41.127,-	30.418,-	16.709,-	44.127,-	36.418,-	22.709,-	50.127,-
5	CRP	22.848,-	11.424,-	34.273,-	27.418,-	13.709,-	41.127,-	30.418,-	16.709,-	44.127,-	36.418,-	22.709,-	50.127,-
6	VDRL	22.460,-	11.230,-	33.640,-	28.300,-	14.150,-	42.450,-	31.300,-	17.150,-	45.456,-	37.300,-	23.150,-	51.450,-
7	TSH (ADALTTIS)	60.975,-	30.488,-	91.463,-	76.829,-	38.415,-	115.244,-	79.829,-	41.415,-	145.244,-	85.829,-	46.495,-	205.244,-
8	T3 (ADALTTIS)	75.316,-	37.658,-	112.974,-	94.899,-	47.449,-	142.340,-	97.899,-	50.449,-	145.348,-	103.899,-	56.449,-	151.348,-
9	T4 (ADALTTIS)	75.316,-	37.658,-	112.974,-	94.899,-	47.449,-	142.340,-	97.899,-	50.449,-	145.348,-	103.899,-	56.449,-	151.348,-
10	IGM DHF (ADALTTIS)	94.271,-	47.136,-	141.407,-	118.782,-	59.392,-	178.174,-	121.782,-	62.392,-	181.174,-	127.782,-	68.392,-	187.174,-
11	IGG DHF (ADALTTIS)	94.271,-	47.136,-	141.407,-	118.782,-	59.392,-	178.174,-	121.782,-	62.392,-	181.174,-	127.782,-	68.392,-	187.174,-
12	HBS AG (ADALTTIS)	42.000,-	21.000,-	63.000,-	50.400,-	25.200,-	75.600,-	53.400,-	28.200,-	81.600,-	59.400,-	34.200,-	93.600,-
13	HBS Ab (ADALTTIS)	45.000,-	22.500,-	67.500,-	54.000,-	27.000,-	81.000,-	57.000,-	30.000,-	87.000,-	63.000,-	36.000,-	99.000,-
14	HBe AG (ADALTTIS)	81.000,-	40.500,-	121.500,-	97.200,-	48.600,-	145.800,-	100.200,-	51.600,-	151.800,-	106.200,-	54.600,-	160.800,-
15	HBe Ab (ADALTTIS)	81.000,-	40.500,-	121.500,-	97.200,-	48.600,-	145.800,-	100.200,-	51.600,-	151.800,-	106.200,-	54.600,-	160.800,-
16	Hbc A b IGM (ADALTTIS)	81.000,-	40.500,-	121.500,-	97.200,-	48.600,-	145.800,-	100.200,-	51.600,-	151.800,-	106.200,-	54.600,-	160.800,-
17	IGM ANTI HAV	84.700,-	42.350,-	127.050,-	101.640,-	50.820,-	152.460,-	104.640,-	53.820,-	158.460,-	110.640,-	59.820,-	170.460,-
18	IGG ANTI HAV	84.700,-	42.350,-	127.050,-	101.640,-	50.820,-	152.460,-	104.640,-	53.820,-	158.460,-	110.640,-	59.820,-	170.460,-
19	AMP	15.000,-	7.500,-	22.500,-	18.000,-	9.000,-	27.000,-	21.000,-	12.000,-	33.000,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
20	COC	15.000,-	7.500,-	22.500,-	18.000,-	9.000,-	27.000,-	21.000,-	12.000,-	33.000,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
21	THC	15.000,-	7.500,-	22.500,-	18.000,-	9.000,-	27.000,-	21.000,-	12.000,-	33.000,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
22	MOR	15.000,-	7.500,-	22.500,-	18.000,-	9.000,-	27.000,-	21.000,-	12.000,-	33.000,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
23	BZD	15.000,-	7.500,-	22.500,-	18.000,-	9.000,-	27.000,-	21.000,-	12.000,-	33.000,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
24	PLASMATTC MALARIA	74.400,-	37.200,-	111.600,-	89.280,-	44.640,-	133.920,-	92.280,-	47.640,-	139.920,-	98.280,-	53.640,-	151.920,-
25	PLASMATTC TB	74.400,-	37.200,-	111.600,-	89.280,-	44.640,-	133.920,-	92.280,-	47.640,-	139.920,-	98.280,-	53.640,-	151.920,-
26	DARAH LENGKAP ADVIA 60	22.000,-	11.000,-	33.000,-	26.400,-	13.200,-	39.600,-	29.400,-	16.200,-	45.600,-	35.400,-	22.200,-	57.600,-
27	GAMBARAN DARAH TERP	19.000,-	5.000,-	15.000,-	12.000,-	6.000,-	18.000,-	15.000,-	9.000,-	24.000,-	21.000,-	15.000,-	36.000,-

28	HITUNG EOSINOFIL	4.000,-	2.000,-	6.000,-	5.200,-	2.520,-	7.720,-	6.760,-	3.276,-	10.036,-	8.122,-	4.258,-	12.370,-
29	RETIKULOSIT	10.000,-	5.000,-	15.000,-	12.600,-	6.300,-	18.900,-	15.876,-	7.938,-	23.814,-	20.010,-	9.245,-	29.255,-
30	FILARIA	7.000,-	3.500,-	10.500,-	8.820,-	4.410,-	13.230,-	9.702,-	4.851,-	14.553,-	11.642,-	5.820,-	17.462,-
31	RUMPLE LED	7.000,-	3.500,-	10.500,-	8.820,-	4.410,-	13.230,-	9.702,-	4.851,-	14.553,-	11.642,-	5.820,-	17.462,-
32	BMP & EVALUASI	120.000,-	60.000,-	180.000,-	144.000,-	72.000,-	216.000,-	172.800,-	86.400,-	259.200,-	190.000,-	95.040,-	285.040,-
33	COMB TEST	25.000,-	12.750,-	40.750,-	28.050,-	14.025,-	42.075,-	30.855,-	15.427,-	46.282,-	33.940,-	16.969,-	50.909
34	SEDIMEN URINE	4.000,-	2.000,-	6.000,-	5.200,-	2.520,-	7.720,-	6.760,-	3.276,-	10.036,-	8.112	4.258,-	12.370,-
35	URINE LENGKAP (COMBILIZE)	13.041,-	6.520,-	19.561,-	15.649,-	7.824,-	23.473,-	16.649,-	8.325,-	24.974,-	18.649,-	10.325,-	28.974,-

B FISIOTERAPI

NO	URAIAN	KELAS III		JUMLAH	KELAS II		JUMLAH	KELAS I		JUMLAH	KELAS UTAMA		JUMLAH
		JS	JP		JS	JP		JS	JP		JS	JP	
1	TILT/ABLE TABLE	6.800,-	10.200,-	17.000,-	7.940,-	11.910,-	19.850,-	9.200,-	13.800,-	23.000,-	9.680,-	14.520,-	24.200,-
2	QUARRICEEFS BOORA	6.800,-	10.200,-	17.000,-	7.940,-	11.910,-	19.850,-	9.200,-	13.800,-	23.000,-	9.680,-	14.520,-	24.200,-

C THT

NO	URAIAN	KELAS III		JUMLAH	KELAS II		JUMLAH	KELAS I		JUMLAH	KELAS UTAMA		JUMLAH
		JS	JP		JS	JP		JS	JP		JS	JP	
A.	TINDAKAN MEDIK THERAFI												
1	OTOSCOPI OPTIC	22.000,-	33.000,-	55.000,-	25.000,-	37.500,-	62.500,-	29.200,-	43.800,-	73.000,-	30.800,-	46.200,-	77.000,-
B.	HIDUNG												
1	LARINGOSCOPY OPTIC	22.000,-	33.000,-	55.000,-	25.000,-	37.500,-	62.500,-	29.200,-	43.800,-	73.000,-	30.800,-	46.200,-	77.000,-
C.	TENGGOROKAN												
1	LARINGOSCOPY OPTIC	22.000,-	33.000,-	55.000,-	25.000,-	37.500,-	62.500,-	29.200,-	43.800,-	73.000,-	30.800,-	46.200,-	77.000,-
D.	KHUSUS												
1	FEES (FUNGSIONAL ENDOSCO PY SINUS SURGESI)	480.000,-	720.000,-	120.000,-	608.000,-	912.000,-	1.520.000,-	736.000,-	1.104.000,-	1.840.000,-	792.000,-	1.188.000,-	1.980.000,-

D ANAK

NO	URAIAN	KELAS III		JUMLAH	KELAS II		JUMLAH	KELAS I		JUMLAH	KELAS UTAMA		JUMLAH
		JS	JP		JS	JP		JS	JP		JS	JP	
1	INCUBATOR	11.500,-	7.000,-	18.500,-	20.000,-	6.000,-	26.000,-	22.500,-	9.000,-	31.500,-	23.500,-	11.000,-	34.500,-
2	LIGHT THERAPI (THERAPY SINUSITIS)	11.500,-	7.000,-	18.500,-	20.000,-	6.000,-	26.000,-	22.500,-	9.000,-	31.500,-	23.500,-	11.000,-	34.500,-

NO	URAIAN			JUMLAH
		JS	JP	
1	DALAM KOTA P. SIDIMPUAN	30.000,-	6.000,-	36.000,-
2	LUAR KOTA 15 KM	35.000,-	7.000,-	42.000,-
3	SELEBIHNYA SETIAP 1 KM 1x PAKAI	3.500,-	500,-	4.000,-

CATATAN : P. INFUS, P. CATETER, P. NGT DIHITUNG DALAM 5 HARI SATU KALI
PEMBERIAN MAKAN MELALUI NGT, INJEKSI DIHITUNG SATU KALI PER HARI

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 15 MEI 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 23

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTTON

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPADA BAGIAN HUKUM,


RAHDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024